

## **ABSTRACT**

***Nana ristana : "The function of President legislation related to the position of DPR as a legislative institution in Indonesian Government system"***

Indonesian as the most other eurofa Continental countries which apply the division of power system. Indonesia never acknowledge a monarchy. Government style whom almost it's official top government use the Separation Power the government of Indonesia Cousist of three major Institutions They are legislative, executive and yudicative institutions which are cooperating ruch other in implementing all policies and programmes signatured constitutionally, each those major institutions has its main authorities to develop people's welfare, part of them proposed based on the urgent need of people part of other realize those people's wishes in regular applications.

Indonesian is a law country which all policies and decisions of country will protected by fixed rules, the 20 th rules verse I of UUD 1945 said. " DPR "people refresentative has authority to make ordinance" how ever, being legislation the legislative and executive boar together disauss to ordinance to get for the 20 th rules verse 2 it stresses that the implementation of society sovereignty theory J.J Rousseau and Mawardi that President as the leader of country and also the refresentation or society has authority progressing of legislation to determine the direction of country, welfare democraton, guarantee the life of society based on ordinance (UUD 1945).

The purpose of this writing to know the function of Presiden legislation related with position of people refresentation of legislative and futher about the cooperation between legislative and executive two boarding are different making ordinance. The basic truth and cooperation prossesing of making ordinance based on UUD 1945.

This resesach is descriptive to a number of reading book, magazine, the apxerts of civil material the technique of the reseach uses the aproachnebt of library study, the sources obtained from books, magazines, and literatures supporting to the writing and the result of interview by a member of DPR-RI

The obtained data shows that function of Presiden to his authority legislaty tends to executively is stionger to make ordinance tha legislatively, al thought theory of indoneisa System has been fixed with the concep of civil applied by Indonesian Republic is UUD 1945.





## ABSTRAKSI

**Nana ristana: "Fungsi Legislasi Presiden kaitanya dengan kedudukan DPR sebagai Lembaga legislatif dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia"**

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan seperti halnya di anut negara-negara erofa kontinental yaitu menganut pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang keberadaan lembaga legislatif, esekutif dan yudikatif dalam rangka penyelenggaraan negara mempunyai kekuasaan terpisah antara satu sama lain dan tidak saling tergantung. tetapi terdapat pola kemitraan atau keterkaitan termasuk dalam pembentukan undang-undang (legislasi) antara Legislatif dan eksekutif

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*maschstaat*), memiliki kerangka Konstitusionalisme dalam proses pembentukan Undang-undang. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang" namun dalam proses legislasi Badan legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) bersama-sama membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapat persetujuan bersama pasal 20 ayat (2) UUD 1945. hal ini menegaskan implementasi dari teori negara kedaulatan rakyat J.J.Rousseau dan Mawardi bahwa Presiden sebagai pimpinan negara juga wakil rakyat mempunyai kewenangan dalam proses legislasi disamping kewenangan Dewan Perwakilan rakyat untuk menentukan arah negara demokrasi kesejahteraan '*welfare staat*' menjamin kehidupan rakyat sesuai dengan Kerangka Konstitusional negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945

Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui fungsi legislasi Presiden kaitanya dengan kedudukan Dewan Perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif dan mengetahui lebih lanjut dari bentuk hubungan pola kemitraan atau kerjasama yang ada antara kedua lembaga yang berbeda yakni eksekutif dan legislatif dalam pembuatan Undang-Undang, apa yang menjadi dasar pembenaran dari kerjasama tersebut sehingga dalam proses pembentukan Undang-undang, ini sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap sejumlah bahan bacaan, buku, majalah dan makalah para ahli di bidang hukum tata negara, teknik penelitian menggunakan studi kepustakaan, sumber-sumber data di peroleh dari buku-buku, majalah-majalah dan berbagai literatur ang mendukung terhadap penulisan skripsi ini serta hasil wawancara dengan salah satu anggota DPR-RI .

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi presiden terhadap kewenangannya dalam bidang legislasi, adanya kecenderungan eksekutif lebih kuat dalam pembentukan Undang-undang daripada legislatif, walaupun secara teoritis sistem legislasi Indonesia telah sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang dianut oleh Republik Indonesia dan dasar hukum Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945.